

# Menuju Asean Economic Community 2015 dalam Kondisi Pembangunan Ekonomi yang Timpang

Stanislaus Risadi Apresian  
Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan  
E-mail : risadiapresian@gmail.com

**Abstract:** Economic development gap has divided ASEAN countries into two groups named ASEAN-6 and CLMV. Yet, ASEAN is still in the process to establish ASEAN Economic Community (AEC) in 2015. And in attempt to establish AEC, equitable economic development becomes one of the main characteristics in AEC Blueprint. A debate then arises whether ASEAN is plausible to establish economic community successfully or not. In fact, development gap does not always obstruct the establishment of a community. As for an example, development gap also exists in European region but it is not regarded as a serious problem that can hinder European countries to establish European Union. This study is aimed at discussing the influences of economic development gap among ASEAN countries towards the process of AEC establishment. In this study, dependent development theory of Cardoso is used to analyze the development gap in ASEAN. Based on further analysis, it is found that the development gap in ASEAN is influenced by the international economic structure. Data shows that ASEAN countries are integrated (in?) to international structure through the foreign direct investment from the center states. This condition places ASEAN countries as the dependent countries.

**Key Words:** development gap, ASEAN Economic Community (AEC), dependent development

**Abstrak:** Kesenjangan pembangunan ekonomi telah membagi negara-negara ASEAN menjadi dua kelompok bernama ASEAN-6 dan CLMV (Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam). Namun, ASEAN masih dalam proses untuk membentuk Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC) pada tahun 2015. Dalam rangka upaya untuk membangun AEC, pembangunan ekonomi yang merata menjadi salah satu ciri utama dalam AEC. Perdebatan kemudian muncul apakah ASEAN masuk akal untuk membangun komunitas ekonomi berhasil atau tidak. Bahkan, kesenjangan pembangunan tidak selalu menghalangi pembentukan masyarakat. Adapun contoh, kesenjangan pembangunan juga terdapat di kawasan Eropa tetapi tidak dianggap sebagai masalah serius yang dapat menghambat negara-negara Eropa untuk mendirikan Uni Eropa. Penelitian ini bertujuan untuk membahas pengaruh kesenjangan pembangunan ekonomi antara negara-negara ASEAN terhadap proses pembentukan AEC. Dalam penelitian ini, teori pembangunan yang dikemukakan oleh Cardoso digunakan untuk menganalisis kesenjangan pembangunan di ASEAN. Berdasarkan analisis lebih lanjut, ditemukan bahwa kesenjangan pembangunan di ASEAN dipengaruhi oleh struktur ekonomi internasional. Data menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN yang terintegrasi (dalam hal apakah?) Struktur internasional melalui investasi langsung asing dari negara-negara pusat. Kondisi ini menempatkan negara-negara ASEAN sebagai negara yang tergantung.

**Kata Kunci:** kesenjangan pembangunan, ASEAN Economic Community (AEC), pengembangan ketergantungan

## Pendahuluan

Tulisan ini hendak mendiskusikan pengaruh ketimpangan pembangunan terhadap proses integrasi ekonomi kawasan Asia Tenggara melalui skema ASEAN *Economic Community* (AEC). Pada tahun 2015 atau sekitar kurang dari satu tahun lagi sejak tulisan ini disusun, ASEAN akan mulai memberlakukan AEC. Dalam sisa rentang waktu yang terhitung sangat singkat untuk

persiapan AEC, ketimpangan pembangunan masih menjadi salah satu masalah utama yang harus dihadapi negara anggota ASEAN. Ketimpangan pembangunan ekonomi yang terjadi di ASEAN bukan sesuatu yang *given* atau memang sudah ada dan sudah digariskan begitu. Ketimpangan yang terjadi di ASEAN ini dipengaruhi oleh struktur perekonomian internasional. Struktur nasional dan internasional di ASEAN terhubung melalui

FDI negara-negara maju yang masuk ke negara-negara ASEAN dan menciptakan apa yang disebut dengan *dependent development*.

Ketimpangan pembangunan kemudian menjadi perhatian para pemimpin ASEAN, hal ini terlihat dari perumusan pembangunan ekonomi yang merata sebagai salah satu pilar pembentukan AEC. Para pemimpin ASEAN kemudian berusaha untuk mempersempit jarak ketimpangan antar negara anggota ASEAN untuk mewujudkan AEC dengan melaksanakan beberapa agenda seperti pembangunan *small medium enterprises* dan *Initiative for ASEAN Integration* (IAI). Pemerataan pembangunan seperti menjadi prasyarat yang harus dipenuhi untuk mewujudkan suatu komunitas ekonomi. Tulisan ini kemudian mempertanyakan kembali mengapa ketimpangan pembangunan menjadi masalah dalam pembentukan AEC. Apakah dalam membentuk suatu komunitas setiap negara anggota harus berada pada suatu level pembangunan ekonomi yang sama? Apakah kondisi pembangunan ekonomi yang timpang menghambat mereka untuk saling bekerja sama atau saling berdagang satu sama lain? Pengalaman Uni Eropa tentunya dapat menjadi pembandingan dalam kasus ini. Ketimpangan pembangunan ekonomi juga terjadi di Eropa, tetapi dalam kondisi pembangunan ekonomi yang timpang, negara-negara anggota Uni Eropa berhasil membentuk Komunitas Eropa pada 1 Juli 1967 dan berkembang menjadi Uni Eropa pada 1 November 1993.

Ketimpangan pembangunan menjadi realita yang harus dihadapi oleh masyarakat

ASEAN dalam upaya melaksanakan agenda integrasi ekonomi. Ketimpangan pembangunan ekonomi memang sangat besar di antara negara-negara ASEAN. Hal ini dapat dilihat dari salah satu indikator yaitu pendapatan perkapita. Data menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan perkapita ASEAN-6 (Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia, Filipina dan Brunei) 10 kali lebih besar daripada Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Negara-negara seperti Malaysia dan Singapura sudah jauh meninggalkan negara-negara yang baru saja bergabung dengan ASEAN yaitu Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam (CLMV).<sup>257</sup> Kapasitas pembangunan masing-masing negara yang berbeda dapat mempengaruhi keberhasilan kerjasama negara-negara ASEAN untuk mewujudkan AEC. Secara spesifik studi ini akan berpijak pada dua pertanyaan utama. Mengapa ketimpangan pembangunan terjadi di ASEAN dan apa pengaruhnya terhadap usaha pembentukan ASEAN *Economic Community* 2015?

### **Gambaran Umum Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di ASEAN**

ASEAN begitu terkenal karena keberagamannya, baik keberagaman budaya, keberagaman politik bahkan yang paling mencolok adalah keberagaman tingkat ekonominya. Rokiah dan Ramadan mendefinisikan ketimpangan pembangunan di

---

<sup>257</sup> D. Narjoko, P. Kartika & T. Wicaksono, 'Narrowing the Development Gap in ASEAN', dalam M.G. Plummer & C.S. Yue, *Realizing the ASEAN Economic Community: A Comprehensive Assesment*, Institute of Southeast Asian Studies, East-West Center, 2009, hlm. 123.

ASEAN sebagai kondisi di mana terjadi perbedaan baik pendapatan perkapita maupun pembangunan sosial antara satu negara dengan negara lain dalam satu kawasan.<sup>258</sup> ASEAN terdiri dari 10 negara anggota dengan tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Kesepuluh negara dengan tingkat ekonomi yang sangat bervariasi tersebut dapat dikategorikan ke dalam tiga tingkatan ekonomi yaitu sudah maju, transisi dan kurang berkembang.<sup>259</sup> Singapura dan Brunei masuk ke dalam kategori negara dengan tingkat ekonomi yang sudah maju. Malaysia, Thailand, Indonesia, dan Filipina masuk kedalam kategori negara dengan tingkat ekonomi yang masih dalam masa transisi. Sedangkan, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam masuk ke dalam kategori negara dengan tingkat ekonomi kurang berkembang. Secara umum negara-negara bekas jajahan di Afrika dan Asia, kecuali Singapura dan Brunei, diklasifikasikan sebagai negara *underdeveloped*, kemudian disebut sebagai *less developed* dan pada perkembangan selanjutnya disebut sebagai *developing*.<sup>260</sup>

Melihat pembangunan ekonomi di ASEAN, Bank Dunia telah mengklasifikasikan negara-negara di ASEAN berdasarkan tingkat pendapatan. Bank Dunia kemudian mengklasifikasikannya menjadi empat yaitu negara dengan pendapatan ekonomi tinggi,

menengah tinggi, menengah rendah dan rendah. Singapura dan Brunei adalah negara terkaya di ASEAN dan dikategorikan sebagai negara dengan tingkat pendapatan ekonomi tinggi. Singapura merupakan negara maju dengan diversifikasi ekonomi tinggi yang berbasis pada jasa terutama perbankan dan keuangan. Brunei perekonomiannya tidak terdiversifikasi dengan baik. Brunei tergantung pada pengolahan cadangan minyak yang besar. Malaysia adalah satu-satunya negara yang masuk kategori negara dengan pendapatan ekonomi menengah tinggi dan mempunyai rencana ambisius menjadi negara maju pada tahun 2020. Malaysia mengembangkan sektor manufaktur dan jasa dengan teknologi tinggi serta tetap mempertahankan sektor pertaniannya. Thailand, Indonesia dan Filipina masuk ke dalam kategori negara dengan pendapatan ekonomi menengah rendah. Ketiga negara tersebut memiliki ciri yang hampir sama yaitu dominasi kekayaan oleh segelintir orang dan tingginya angka kemiskinan. Vietnam, Kamboja, Myanmar dan Laos merupakan negara dengan pendapatan ekonomi rendah. Negara-negara ini masih tergantung pada sektor pertaniannya.<sup>261</sup>

Dalam mengukur tingkat ketimpangan pembangunan, tidak ada acuan yang pasti karena pembangunan sendiri belum memiliki definisi tunggal. Masing-masing pihak yang berkepentingan menggunakan beberapa indikator untuk melihat ketimpangan pembangunan yang terjadi. Ada beberapa indikator yang sering digunakan misalnya saja

---

<sup>258</sup> R. Alavi, & A. A. Ramadan, 'Narrowing Development Gaps In ASEAN', Jurnal of Economic Cooperation, 29, 1, 2008, hlm. 31.

<sup>259</sup> Narjoko, Kartika, dan Wicaksono, hlm. 112.

<sup>260</sup> D. E. Weatherbee, *International Relations in Southeast Asia The Struggle for Autonomy*, 2nd edn, Rowman & Littlefield Publisher, Inc., Maryland, 2009, hlm. 16.

---

<sup>261</sup> A. McGregor, *Southeast Asian Development*, Routledge, Oxon, 2008, hlm. 45-47.

GDP perkapita, pendapatan perkapita, pertumbuhan GDP, *Human Development Index* (HDI), populasi kemiskinan, dan infrastruktur. Selanjutnya, indikator-indikator tersebut akan digunakan untuk melihat ketimpangan pembangunan ekonomi di ASEAN.

### GDP Perkapita

Di antara indikator- indikator tersebut, GDP perkapita adalah indikator yang paling sering digunakan untuk mengukur ketimpangan pembangunan. Gambaran umum ketimpangan pembangunan di ASEAN dapat ditinjau dengan mengacu pada indikator GDP perkapita masing-masing negara. GDP perkapita negara-negara ASEAN sangat beragam dan perbedaannya sangat mencolok.

**Tabel 1.**  
**GDP Perkapita Negara-negara ASEAN (US\$)**  
**Periode 2001-2010**<sup>262</sup>

Negara	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Singapura	20.553	20.823	20.987	27.046	26.821	32.960	38.524	38.046	36.631	43.929
Brunai	12.121	12.070	12.971	21.863	16.882	29.922	31.489	35.623	26.486	29.195
Malaysia	3.697	3.924	4.198	4.877	5.001	5.902	6.886	7.992	6.822	8.262
Thailand	1884	2.043	2.291	2.501	2.726	3.164	3.742	4.116	3.951	4.735
Indonesia	688	820	973	1.181	1.275	1.636	1.910	2.237	2.364	3.023
Filipina	924	959	973	1.039	1.160	1.351	1.658	1.844	1.750	2.014
Vietnam	418	439	481	555	635	725	833	1.053	1.120	1.238
Kamboja	283	296	310	392	404	516	601	756	692	731
Myanmar	162	175	179	191	106	233	333	465	420	715
Laos	326	333	362	431	418	613	703	918	911	1.045
ASEAN-6	6.644,5	6.773,2	7.065,5	9.751,2	8.977,5	12.489,2	14.034,8	14.976,3	13.000	15.193
CLMV	378,7	310,7	333	392,2	390,7	521,7	617,5	798	785,7	932,25

Sejak tahun 2001, Singapura adalah negara yang GDP perkapitanya terbesar sedangkan Myanmar sejak tahun 2001 GDP perkapitanya paling rendah di antara negara-negara anggota ASEAN yang lain. Dengan

membandingkan GDP perkapita kedua negara tersebut kita dapat melihat besarnya ketimpangan yang ada. Pada tahun 2001, GDP perkapita Singapura sebesar US\$ 20.553 dan besarnya sekitar 127 kali lebih besar daripada GDP perkapita Myanmar yang hanya sebesar US\$ 162. Sepuluh tahun kemudian tidak ada perubahan yang signifikan atas perbandingan dua negara dengan GDP perkapita terbesar dan terkecil ini. Pada tahun 2010, perbedaan GDP perkapita kedua negara tersebut masih sangat besar. Singapura dengan GDP perkapita sebesar US\$ 43.929 besarnya sekitar 42 kali besar GDP perkapita Myanmar dengan besar US\$ 715.

Berbicara mengenai ketimpangan, tentu saja tidak bisa luput dari perbandingan antara negara-negara ASEAN-6 dan negara-negara CLMV. GDP perkapita negara ASEAN-6 memang selalu berada jauh di atas negara-negara CLMV. Rata-rata GDP perkapita ASEAN-6 selalu jauh di atas CLMV dan selalu begitu dalam kurun waktu 10 tahun. Pada tahun 2001, rata-rata GDP ASEAN-6 sebesar US\$ 6.644,5 sedangkan rata-rata GDP perkapita CLMV hanya sebesar US\$ 378,75. Pada tahun 2010, setelah 10 tahun pembangunan, tidak ada perubahan yang signifikan dari kondisi yang timpang ini. Rata-rata GDP perkapita ASEAN-6 mencapai US\$ 15.193 sebaliknya rata-rata GDP perkapita CLMV hanya naik sedikit ke angka US\$ 932,25. Kondisi ini menyebabkan ASEAN terpolarisasi menjadi dua kutub atau kelompok yang berbeda yaitu ASEAN-6 yaitu 5 negara pendiri ASEAN ditambah dengan Brunei dan CLMV yaitu negara anggota baru ASEAN

<sup>262</sup> ASEAN, GDP Per Capita of ASEAN Countries, <http://www.aseansec.org/stat/Table7.pdf>, diakses pada tanggal 7 November 2012.

antara lain Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam.

### Pertumbuhan Ekonomi

Persentase pertumbuhan ekonomi dapat memproyeksikan terhadap gambaran pertumbuhan ekonomi suatu negara dari tahun ketahun. Pertumbuhan ekonomi tidak selalu positif atau meningkat dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi suatu negara juga kadang mengalami kecenderungan negatif atau penurunan seperti yang dialami Singapura, Brunei, Malaysia dan Thailand pada tahun 2009. Pada tahun 2008, terjadi krisis global yang ternyata berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi keempat negara yang relatif lebih maju dari negara ASEAN yang lain.

Persentase pertumbuhan ekonomi ini berguna untuk melihat perkembangan perekonomian suatu negara. Dalam tulisan ini, data persentase pertumbuhan ekonomi dapat digunakan untuk melihat perbandingan perkembangan ekonomi negara ASEAN-6 dan CLMV. Data-data di atas mungkin dapat menjadi acuan untuk menjawab pertanyaan mendasar seputar ketimpangan ekonomi di ASEAN yaitu akankah ketimpangan ekonomi di ASEAN dapat diatasi atau dapat dipersempit jaraknya.

Tabel 2.  
Persentase Pertumbuhan Ekonomi  
2001-2010<sup>263</sup>

Negara	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Singapura	-2,4	4,2	3,1	8,8	6,6	7,9	10,1	1,8	-0,8	14,5
Brunai	2,7	3,9	2,9	0,5	0,4	4,4	0,6	-1,4	-1,8	2,6
Malaysia	0,5	5,4	5,8	6,9	7,3	8,3	6,0	4,8	-1,6	7,2
Thailand	2,2	5,3	7,1	6,3	4,7	5,2	4,9	2,5	-2,2	7,8
Indonesia	3,6	4,5	4,8	5,0	5,7	5,5	6,3	6,0	4,5	6,1
Filipina	4,5	4,4	3,7	6,4	4,9	5,3	7,4	3,4	1,1	7,3
Vietnam	6,9	7,0	7,4	7,8	8,4	8,2	8,5	6,3	5,2	6,8
Kamboja	5,5	5,2	12,6	10,0	13,6	10,8	10,2	6,7	0,1	5,0
Myanmar	10,5	5,5	5,1	5,0	4,5	6,9	5,6	3,6	4,8	5,3
Laos	5,7	5,9	5,8	6,9	7,3	8,3	6,0	7,8	7,6	7,2
ASEAN-6	1,85	4,6	4,56	5,65	4,93	6,1	5,88	2,85	-0,13	7,58
CLMV	7,15	5,9	5,15	7,43	8,45	8,55	7,57	4,07	2,95	6,08

Sumber: ASEAN Statistical Yearbook 2008,  
*ASEAN Community in Figures 2011*

Data persentasi pertumbuhan ekonomi di atas menunjukkan pola bahwa rata-rata persentase pertumbuhan ekonomi negara CLMV selalu lebih besar daripada rata-rata persentase pertumbuhan ekonomi negara ASEAN-6 kecuali pada tahun 2010. Pola yang demikian, apabila terus berlanjut mengindikasikan bahwa ketimpangan ekonomi lambat laun dapat dipersempit jaraknya. Pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah kapan atau berapa tahun lagi ketimpangan ekonomi yang terlampaui jauh tersebut akan teratasi? Apakah pada tahun 2015, ketika AEC ini direalisasikan, masalah ketimpangan ekonomi bisa teratasi?

Dengan menggunakan hitungan matematis, secara kasat mata, jelas terlihat kalau ketimpangan ekonomi antara negara

<sup>263</sup> Data didapat dari dua sumber yaitu ASEAN, ASEAN Statistical Yearbook 2008 (online), <<http://www.aseansec.org/Publication-ASEAN-SYB-2008.pdf>>, diakses 7 November 2012, dan ASEAN, ASEAN Community in Figures 2011 (online) <[www.aseansec.org/.../ASEAN%20community%20in%20figures.pdf](http://www.aseansec.org/.../ASEAN%20community%20in%20figures.pdf)>, diakses pada tanggal 19 September 2012.

ASEAN-6 dan negara CLMV tidak bisa diatasi dalam waktu beberapa tahun, apalagi pada tahun 2015. Usaha mempersempit ketimpangan pembangunan membutuhkan waktu yang lebih lama dari itu.

### Ketimpangan Pendapatan

Pengklasifikasian yang dilakukan oleh Bank Dunia, seperti yang sudah dijelaskan dalam bagian sebelumnya memberikan gambaran secara jelas bahwa ASEAN juga timpang dalam segi pendapatan. Negara anggota ASEAN menurut Bank Dunia terbagi ke dalam empat kategori perekonomian negara berdasarkan tingkat pendapatan. Perlu diketahui bahwa pendapatan merupakan salah satu komponen dari pembangunan yang sangat penting. Besarnya pendapatan mempengaruhi seberapa perkembangan pembangunan yang dapat dilakukan. Ketimpangan pendapatan dapat dilihat dengan menggunakan indikator *Gross National Income* (GNI) perkapita.

Tabel 3.  
GNI Perkapita ASEAN  
2001-2010<sup>264</sup>

Negara	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Singapura	22.090	21.780	22.860	24.760	27.240	30.620	33.760	35.750	36.030	39.410
Brunai	16.350	17.400	18.040	20.190	23.210	25.570	30.720	33.680	31.800	-
Malaysia	3.510	3.740	4.100	4.660	5.110	5.610	6.310	7.170	7.230	7.760
Thailand	1.880	1.870	2.030	2.340	2.560	2.830	3.200	3.640	3.720	4.150
Indonesia	660	720	830	1.070	1.220	1.370	1.600	1.950	2.160	2.500
Filipina	1.040	1.000	1.040	1.140	1.210	1.310	1.510	1.770	1.870	2.060
Vietnam	410	430	480	550	630	700	790	920	1.030	1.160
Kamboja	310	310	350	400	460	520	590	670	700	750
Myanmar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Laos	310	320	340	390	460	510	620	760	900	1.010

Sumber : World Bank

<sup>264</sup> The World Bank, GNI per capita, Atlas method (online) <http://data.worldbank.org/indicator/NY.GN.P.PCAP.CD>, diakses pada tanggal 30 November 2012.

### Human Development Index

Tabel 4.  
Human Development Index<sup>265</sup>

Negara	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Singapura	0,884	0,902	0,907	0,916	0,922	0,942	0,944
Brunai	0,872	0,867	0,866	0,871	0,894	0,919	0,920
Malaysia	0,790	0,793	0,796	0,805	0,811	0,825	0,829
Thailand	0,768	0,768	0,778	0,784	0,781	0,786	0,783
Indonesia	0,682	0,692	0,697	0,711	0,728	0,729	0,734
Filipina	0,751	0,753	0,758	0,763	0,771	0,747	0,751
Vietnam	0,688	0,691	0,704	0,709	0,733	0,72	0,725
Kamboja	0,556	0,568	0,571	0,583	0,598	0,584	0,593
Myanmar	0,549	0,511	0,578	0,581	0,583	0,584	0,586
Laos	0,525	0,534	0,545	0,553	0,601	0,613	0,619

Sumber : World Bank

*Human Development Index* (HDI) terdiri dari 3 indikator kualitatif yaitu usia harapan hidup, pendidikan, dan standar kehidupan. Berdasarkan data di atas, sampai pada tahun 2007, negara ASEAN-6 di atas rata-rata HDI negara CLMV. Hanya negara Vietnam yang HDI nya tinggi dan hampir menyamai HDI negara ASEAN-6. HDI Kamboja, Myanmar dan Laos masih jauh di bawah negara ASEAN-6 angkanya masih selalu berada di bawah 0,6. Hanya Laos yang sedikit mengalami perubahan HDI dan berhasil naik menembus angka 0,6.

### Tingkat Kemiskinan

Keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari tingkat kemiskinan yang ada di suatu negara. Apabila tingkat kemiskinan tinggi, ditandai dengan besarnya populasi penduduk miskin, dapat diartikan bahwa pembangunan belum berjalan dengan baik.

<sup>265</sup> ASEAN, ASEAN Statistical Yearbook 2010 (online), <http://www.asean.org/resources/2012-02-10-08-47-55/statistical-publications>, diakses pada tanggal 7 November 2012.

**Tabel 5.**  
**Persentase Populasi di bawah Garis Kemiskinan Nasional**

Negara	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Singapura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brunai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malaysia	-	5,1	-	5,7	-	-	3,6	-	-	3,8
Thailand	13,0	9,8	-	11,2	12,0	9,6	-	8,5	8,1	-
Indonesia	18,4	18,2	17,4	16,7	16,7	-	16,6	-	-	13,8
Filipina	-	-	30,0	-	32,9	26,4	-	-	-	24,0
Vietnam	-	28,9	-	19,5	16,0	16,0	14,8	14,5	-	-
Kamboja	-	-	-	34,7	33,0	-	30,1	-	-	26,0
Myanmar	26,6	-	32,0	-	32,0	-	-	-	-	-
Laos	-	33,5	32,7	-	30,0	-	-	27,6	-	24,0

Sumber: ASEAN Statistical Yearbook 2010<sup>266</sup>  
ASEAN Community in Figure 2011<sup>267</sup>

Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan klasik dalam pembangunan. Permasalahan kemiskinan juga tak luput melanda negara-negara di ASEAN. Permasalahan kemiskinan yang dihadapi Indonesia, Filipina, Vietnam, Kamboja, Myanmar dan Laos cukup memprihatinkan karena populasi yang hidup dibawah garis kemiskinan mencapai lebih dari 10% bahkan di Kamboja pada tahun 2005 mencapai angka 33%

### Infrastruktur

**Tabel 6.**  
**ASEAN Road Infrastructure 2006 -2010**<sup>268</sup>

Negara	Total Panjang Jalan					Panjang Jalan yang Sudah Dikeraskan/Diratakan				
	2006	2007	2008	2009	2010	2006	2007	2008	2009	2010
Singapura	3.262	3.297	3.325	3.356	-	3.262	3.297	3.325	3.35	-
Brunai	3.728	3.774	-	-	-	2.843	2.883	-	-	-

<sup>266</sup> ASEAN, ASEAN Statistical Yearbook 2010 (online), <[www.aseansec.org/publications/ACIF2010.pdf](http://www.aseansec.org/publications/ACIF2010.pdf)>, diakses pada tanggal 7 November 2012.

<sup>267</sup> ASEAN, ASEAN Community in Figures 2011 online <[www.aseansec.org/.../ASEAN%20community%20in%20figures.pdf](http://www.aseansec.org/.../ASEAN%20community%20in%20figures.pdf)>, diakses pada tanggal 19 September 2012.

<sup>268</sup> Data diambil dari dua sumber, ASEAN, ASEAN Statistical Yearbook 2008 (online),

Malaysia	90.127	91.892	90.467	123.021	-	71.292	73.054	71.875	98.368	-
Thailand			5	-	-	50.534	-	50.589	-	-
Indonesia	04	396.362	437.759	-	-	216.545	221.905	258.744	-	-
Filipina	29.208	29.370	29.650	-	-	20.502	21.006	21.677	-	-
Vietnam	269.948	-	287.699	-	-	163.255	-	153.771	-	-
Kamboja	30.258	30.391	30.652	39.618	-	2.241	2.376	2.342	2.661	-
Myanmar	104.158	111.737	125.355	127.942	-	23.880	24.374	24.684	24.975	-
Laos	35.260	37.323	37.800	38.088	-	4.548	4.723	4.734	4.743	-

Sumber: ASEAN Statistical Yearbook 2008  
ASEAN Statistical Yearbook 2010

Pembangunan akan berjalan baik apabila infrastruktur yang ada memadai. Infrastruktur yang mendasar dalam pembangunan adalah jalan karena dengan infrastruktur jalan yang memadai tentu akan diikuti oleh peningkatan distribusi barang. Di atas sudah disajikan data mengenai infrastruktur jalan di ASEAN. Setiap negara ASEAN memiliki banyak jalur atau ruas jalan namun tidak semua negara ASEAN mampu mengaspal atau melakukan pengerasan terhadap semua jalan tersebut. Singapura adalah satu-satunya negara yang mampu melakukan pengerasan jalan di seluruh total panjang jalan yang dimiliki. Singapura merupakan negara dengan luas wilayah yang kecil, jadi penanganan infrastruktur jalan relatif lebih mudah apabila dibandingkan dengan Indonesia dengan bentuk wilayah kepulauan dan luas wilayah terbesar di ASEAN.

<<http://www.aseansec.org/Publication-ASEAN-SYB-2008.pdf>>, diakses pada tanggal 7 November 2012, dan ASEAN, ASEAN Statistical Yearbook 2010 online <<http://www.asean.org/resources/2012-02-10-08-47-55/statistical-publications>>, diakses pada tanggal 7 November 2012.

Dari data di atas, kesimpulan yang dapat diambil setelah memperhatikan angka-angka tersebut adalah pembangunan infrastruktur di negara CLMV masih tertinggal sangat jauh. Pada tahun 2009 misalnya, Kamboja memiliki total jalan sepanjang 39.618 km tetapi hanya 2.261 km jalan yang sudah dikeraskan atau hanya sekitar 17,5% jalan yang dikeraskan. Ini menandakan bahwa pembangunan masih kurang dan masih banyak daerah pelosok yang luput dari pembangunan.

### ***Dependent Development di ASEAN***

Seperti yang sudah dijelaskan pada awal tulisan ini, ketimpangan pembangunan ekonomi di ASEAN disebabkan oleh permasalahan struktural. Struktur perekonomian internasional yang ada mempengaruhi kondisi pembangunan ekonomi yang timpang di ASEAN. Salah satu pemikiran strukturalis yang terkenal adalah pemikiran dari Fernando Henrique Cardoso mengenai *dependent development*. Cardoso dalam beberapa tulisannya menjelaskan mengenai fenomena dependensi dan pembangunan yang terjadi di Amerika Latin. Dalam melihat fenomena tersebut, Cardoso menggunakan pendekatan historis-struktural. Cardoso mencoba memahami permasalahan pembangunan dengan melakukan interpretasi terhadap proses karakter politik dari transformasi ekonomi. Tiga kata kunci untuk memahami teori Cardoso yaitu proses ekonomi, kondisi struktural dan situasi sejarah.

Pendekatan Cardoso tersebut digunakan untuk memahami kondisi ekonomi politik di Amerika Latin, namun pendekatan

tersebut dapat diaplikasikan juga untuk memahami ketimpangan pembangunan di ASEAN dengan memperhatikan proses ekonomi, kondisi struktural dan situasi sejarah. Ketiga komponen tersebut akan menjadi kunci untuk memahami ketimpangan pembangunan yang terjadi di ASEAN. Proses ekonomi di ASEAN dapat dilihat dari interaksi perekonomian dan perdagangan negara-negara ASEAN dengan negara-negara maju. Sedangkan struktur nasional masing-masing negara ASEAN dipengaruhi oleh struktur internasional yang ada.

Selama ini banyak orang menganggap struktur kapitalisme global telah mengeksploitasi negara-negara *periphery* dan membuat negara *periphery* semakin terpuruk perekonomiannya. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah, kedua kelompok negara *center* dan *periphery* sama-sama mengalami pembangunan. Negara-negara *periphery* juga mengalami apa yang disebut pembangunan. Namun, tingkat laju pembangunannya berbeda dengan negara *center*. Negara *center* mengalami tingkat pembangunan yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara *periphery* karena negara-negara tersebut memegang kontrol terhadap perekonomian negara *periphery* melalui FDI.

Untuk memahami mengapa perekonomian *underdeveloped* terhubung dengan pasar dunia perlu adanya analisa mengenai latar belakang sejarah bagaimana kedua kutub tersebut bisa saling terhubung atau terkoneksi satu sama lain dan bagaimana ekspansi ekonomi awal yang dilakukan oleh negara-negara kapitalis terjadi. Cardoso dan

Falleto tidak menjelaskan mengenai apa yang terjadi di Asia Tenggara, mereka hanya menjelaskan mengenai fenomena yang terjadi di Amerika Latin. Tulisan ini hendak menjelaskan fenomena *dependent development* yang terjadi di Asia Tenggara dengan menggunakan pendekatan yang digunakan oleh Cardoso dan Falleto.

Terhubungnya struktur nasional negara-negara di Asia Tenggara dengan struktur internasional dimulai ketika negara-negara Eropa Barat seperti Inggris, Spanyol, Belanda dan Portugal melakukan ekspansi dan membuat koloni-koloni mereka di kawasan Asia Tenggara. Kolonialisasi mengawali terhubungnya struktur nasional dengan struktur internasional melalui ekspor bahan-bahan mentah untuk menopang industrialisasi besar-besaran di Eropa. Pola hubungan tersebut bahkan masih eksis pasca berakhirnya era imperialisme ketika entitas negara menjadi aktor sentral dalam hubungan internasional. Sebagian besar negara-negara di ASEAN masih mengandalkan sektor agro-ekspor. Pola perdagangan negara-negara ASEAN dengan negara maju pun demikian. Sebagian besar negara-negara ASEAN masih mengandalkan pendapatan dari ekspor produk bahan mentah seperti kayu, timah, getah karet, beras, gula dan kopi. *Upgrading* produk yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN juga masih terbatas karena minimnya penguasaan teknologi.

Terhubungnya struktur nasional dengan struktur internasional melalui ekspansi kapitalisme komersial dan kapitalisme industri telah menempatkan negara-negara dalam

posisi yang berbeda dalam sistem kapitalis. Kondisi tersebut memunculkan apa yang disebut sebagai perekonomian *developed* dan *underdevelop*. Negara-negara Eropa Barat, Jepang, Amerika Serikat merupakan perwakilan dari perekonomian yang *developed*, sedangkan sebagian besar negara-negara ASEAN merupakan perwakilan dari perekonomian yang *underdeveloped*.

Dependensi pembangunan ekonomi *underdeveloped* terhadap perekonomian *developed* di masa kini tentu berbeda dengan apa yang terjadi pada saat era imperialisme atau pada saat negara-negara *center* masih menjadi aktor yang mengontrol sistem ekspor-impor. Perekonomian nasional dengan perekonomian internasional masa kini terintegrasi melalui investasi industri langsung dalam pasar nasional yang baru.<sup>269</sup> Integrasi industri perekonomian negara-negara ASEAN terhubung dengan pasar internasional pada saat yang bersamaan ketika *center of capitalism* tidak lagi berperan sebagai aktor yang mengontrol sistem impor-ekspor. *Center of capitalism* memegang kontrol melalui investasi industri langsung dalam pasar nasional yang baru. Ketika hal tersebut terjadi, industrialisasi mulai masuk ke negara-negara ASEAN melalui investasi industri langsung. Investasi asing semakin terhubung secara langsung dengan sektor manufaktur melalui *private investment*.<sup>270</sup>

Sampai pada perang dunia kedua, industrialisasi hanya dianggap sebagai sebuah

<sup>269</sup> F.H. Cardoso & E. Falleto, *Dependency and Development in America Latin*, University of California Press, California, 1979, hlm. 160.

<sup>270</sup> Cardoso dan Falleto hlm. 160.

alternatif untuk mengatasi *world depression*, bukan sebagai kunci utama pembangunan. Industrialisasi hanya dianggap sebagai sumber tambahan untuk pembangunan dengan mengeksport produk-produk primer.<sup>271</sup> Namun kini industrialisasi menjelma menjadi motor penggerak utama pembangunan.

Sebelum melanjutkan bahasan lebih jauh lagi, perlu adanya pendefinisian terlebih dahulu, negara mana yang disebut sebagai negara *center* dalam kasus dependensi pembangunan di ASEAN. Untuk mendefinisikan siapa sebenarnya negara-negara *center* yang berpengaruh di ASEAN kita dapat melihatnya dari data *ASEAN trade dependency* berikut.

**Tabel. 7 Total Perdagangan ASEAN Dengan Beberapa Mitra Dagang**<sup>272</sup>

ASEAN with Selected Trade Partners: Total Trade<sup>1/</sup> for periods indicated

Country	1998	2000	2003	2008	2009	2010
<i>(In US\$ million)</i>						
Intra-ASEAN	120,918	166,846	206,732	470,112	376,177	519,805
China	20,414	32,316	59,637	196,884	178,190	232,013
EU-27	83,640	102,767	101,683	208,291	171,732	208,585
Japan	81,410	116,191	113,401	214,400	160,893	206,637
USA	115,562	122,218	117,886	186,243	149,582	186,685
Republic of Korea	17,080	29,635	33,548	78,251	74,746	98,628
India	6,968	9,656	12,512	48,803	39,119	55,443
Australia	12,822	17,589	19,197	52,593	43,854	55,426
Canada	4,081	4,833	4,612	10,737	9,040	9,870
Russia	1,035	1,375	2,397	9,794	6,765	9,064
New Zealand	1,621	2,248	2,621	7,837	5,378	7,335
Pakistan	1,521	3,493	1,902	4,922	4,303	6,256
Rest of the World	109,033	149,934	148,411	408,260	317,097	449,983
Total	576,106	759,101	824,539	1,897,127	1,536,878	2,046,731

<sup>1/</sup> Total trade value revised according to the 2010 levels (in million).  
Source : ASEAN Trade Statistics Database, as of October 2011.

<sup>271</sup> Cardoso dan Falleto, hlm. 2.

<sup>272</sup> ASEAN, ASEAN Community in Figures 2011 (online), 2012, hlm. 14, <[www.aseansec.org/.../ASEAN%20community%20in%20figures.pdf](http://www.aseansec.org/.../ASEAN%20community%20in%20figures.pdf)>, diakses pada tanggal 19

**Tabel. 8 Total Perdagangan ASEAN Dengan Beberapa Mitra Dagang (Dalam Persen)**<sup>273</sup>

ASEAN with Selected Trade Partners: Total Trade<sup>1/</sup> (in percent share) for periods indicated

Country	1998	2000	2003	2008	2009	2010
<i>(In percent share to total)</i>						
Intra-ASEAN	21.0	22.0	25.1	24.8	24.5	25.4
China	3.5	4.3	7.2	10.4	11.6	11.3
EU-27	14.5	13.5	12.3	11.0	11.2	10.2
Japan	14.1	15.3	13.8	11.3	10.5	10.1
USA	20.1	16.1	14.3	9.8	9.7	9.1
Republic of Korea	3.0	3.9	4.1	4.1	4.9	4.8
India	1.2	1.3	1.5	2.6	2.5	2.7
Australia	2.2	2.3	2.3	2.8	2.9	2.7
Canada	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5
Russia	0.2	0.2	0.3	0.5	0.4	0.4
New Zealand	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4
Pakistan	0.3	0.5	0.2	0.3	0.3	0.3
Rest of the World	18.9	19.8	18.0	21.5	20.6	22.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

<sup>1/</sup> Percentage of total trade revised according to the 2010 levels.  
Source : ASEAN Trade Statistics Database, as of October 2011.

Dengan melihat data-data di atas, dapat dilihat bahwa nilai total perdagangan beberapa negara dengan ASEAN sangat besar apabila dibandingkan dengan negara-negara lain yang berdagang dengan ASEAN. Negara-negara tersebutlah yang kemudian dikenali sebagai negara-negara *center*. Negara-negara *center* tersebut adalah negara-negara-negara Uni Eropa (EU-27), Amerika Serikat, Jepang dan China.

Investasi asing melalui FDI telah membangun jaringan dependensi negara-negara *periphery* terhadap negara-negara *center*. FDI mulai masuk besar-besaran ke kawasan Asia Tenggara pada tahun 1980-an. Tahun 1980-an merupakan dekade yang penting karena dalam rentang waktu ini terjadi transformasi perekonomian negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Transformasi yang dimaksud adalah perubahan orientasi

<sup>273</sup> ASEAN, ASEAN Community in Figures 2011 (online), 2012, hlm. 15, <[www.aseansec.org/.../ASEAN%20community%20in%20figures.pdf](http://www.aseansec.org/.../ASEAN%20community%20in%20figures.pdf)>, diakses pada tanggal 19 September 2012.

kebijakan pembangunan ekonomi negara-negara ASEAN yang semula menggunakan kebijakan *Import Substitution Industrialization* (ISI) menjadi *Export Oriented Industrialization (EOI)*.

Sebelum mengadopsi program ISI, negara-negara di Asia Tenggara masih dipengaruhi pola perekonomian kolonial, di mana negara-negara *center* masih menentukan pola ekspor dan impor. Negara-negara ASEAN menjadi penyuplai bahan-bahan mentah untuk industrialisasi negara-negara *center*. ISI diadopsi sebagai program perekonomian negara-negara ASEAN agar bisa lepas dari pola perekonomian kolonial.<sup>274</sup>

ISI adalah kebijakan perekonomian yang dekat kaitannya dengan ide *developmental state*. *Developmental state* adalah suatu ide pembangunan untuk secara aktif melakukan intervensi dalam proses perekonomian guna membentuk kondisi yang menyediakan pondasi-pondasi untuk pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, subsidi industrialisme melalui *Import Substitution Industrialization* adalah kebijakan yang diambil untuk membentuk kondisi perekonomian yang kondusif tersebut.<sup>275</sup> Subsidi dari pemerintah digunakan untuk merangsang perusahaan lokal untuk memproduksi barang-barang kebutuhan lokal daripada memproduksi barang-barang untuk tujuan ekspor. Kebijakan ISI ini membutuhkan peran dan dukungan pemerintah yang sangat besar agar berhasil.

Jika kebijakan *Import Substitution Industrialization* berusaha untuk menjaga perekonomian lokal dari intervensi asing, kebijakan *Export-Oriented Industrialisation* mempunyai strategi perekonomian yang jauh berbeda yaitu berusaha menarik FDI untuk berinvestasi guna mendukung daya saing perusahaan domestik secara internasional.<sup>276</sup> Hadirnya EOI di kawasan Asia Tenggara dipelopori oleh Pemerintah Singapura di bawah pemerintahan Lee Kuan Yeu. Dengan keterbatasan pasar domestik, strategi ISI tidak relevan lagi untuk diadopsi di Singapura. EOI kemudian diadopsi oleh Singapura. Dengan mengandalkan lokasi yang strategis sebagai pintu gerbang keluar masuk kawasan Asia Tenggara, dan sistem pendidikan yang maju, Singapura berhasil menerapkan strategi EOI ini.

Transformasi strategi pembangunan dari ISI menjadi EOI kemudian diikuti oleh negara-negara Asia Tenggara yang lain seperti Indonesia, Malaysia, Filipina dan Thailand. Mereka mengikuti jejak Singapura untuk berganti menerapkan strategi EOI. Negara-negara tersebut menerapkan EOI dengan mengurangi tarif dan deregulasi perekonomian mereka. Perkembangan industri manufaktur yang berorientasi ekspor sangat pesat pada era tahun 1980-an. Data menunjukkan bahwa pada akhir tahun 1970-an jumlah industri manufaktur yang berorientasi ekspor di Indonesia persentasenya sebesar 3,7%, di Malaysia 30,1%, di Filipina 20,5% , di Filipina 29,4% dan di Singapura sebesar 42,2%. Pada

---

<sup>274</sup> N. Tarling, *Regionalism in Southeast Asia To Foster the Political Will*, Routledge, New York, 2006, hlm. 32.

<sup>275</sup> A. McGregor, hlm. 49.

<sup>276</sup> A. McGregor, hlm. 50.

tahun 1990 persentase tersebut meningkat pesat, di Indonesia persentasenya meningkat menjadi 34,6%, di Malaysia 54%, di Filipina 62,2%, di Thailand 62,2%, dan di Singapura sebesar 66,1%.<sup>277</sup>

Perpindahan strategi negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Filipina dan Thailand dari ISI menjadi EOI di era 1980-an merupakan salah satu dampak dari resesi perekonomian global yang terjadi pada waktu itu. Negara-negara yang mengandalkan perekonomian pada strategi ISI mulai memikirkan strategi perekonomian yang lebih *outward-oriented* untuk bisa bertahan dari resesi global. Mereka melihat tetangga mereka, yaitu Singapura berhasil menerapkan strategi EOI dengan baik untuk memajukan perekonomiannya.

Kebijakan EOI semakin merangsang besarnya aliran FDI masuk ke wilayah nasional masing-masing negara. Untuk melaksanakan kebijakan EOI, negara-negara ASEAN membutuhkan modal yang sangat besar, teknologi yang memadai agar bisa bersaing di level internasional, dan organisasi produksi. Ketiga hal tersebut tidak dimiliki oleh masing-masing negara *periphery* seperti negara-negara ASEAN. Negara-negara *center* seperti negara-negara Eropa Barat, Jepang dan Amerika Serikat menawarkan ketiga hal yang tidak dimiliki negara-negara ASEAN tersebut. Negara-negara *center* memiliki kapital yang sangat besar, teknologi industri yang selalu *up to date*, dan organisasi produksi yang baik. Kondisi ini kemudian memposisikan negara-

negara *periphery* sebagai pihak yang bergantung terhadap kapital, teknologi dan organisasi produksi yang dimiliki oleh negara maju.

Pada perkembangannya, negara-negara *periphery* dengan FDI mampu meningkatkan performa industri. Mereka mampu melakukan diversifikasi industri, ekspor meningkat, namun ada konsekuensi yang harus ditanggung dengan masuknya FDI ke dalam struktur nasional mereka. Konsekuensi pertama adalah negara-negara ASEAN menjadi tergantung terhadap negara-negara *center* sebagai pendonor FDI. Negara-negara *center* melalui perusahaan multi nasionalnya dapat memberikan tekanan eksternal untuk mengontrol perindustrian negara-negara *periphery*. Peran negara kemudian termarginalkan karena negara tidak mempunyai otoritas penuh untuk mengontrol perekonomian dalam negeri. Sebenarnya negara mempunyai mekanisme untuk mengontrol perekonomian seperti membuat regulasi ekonomi untuk mengontrol FDI. Perekonomiannya meningkat, maka perekonomian negara-negara ASEAN juga meningkat. Namun sebaliknya, apabila perekonomian negara-negara *center* menurun. Namun, kadang regulasi tersebut tidak efektif untuk mengontrol FDI yang masuk ke dalam wilayah domestik mereka.

FDI memang dapat memberikan dampak negatif berupa ketergantungan terhadap negara maju tetapi perlu adanya pemahaman bahwa FDI tidak selalu membawa dampak negatif bagi negara *periphery*. Namun fakta bahwa FDI telah menyumbang kemajuan

---

<sup>277</sup> N. Tarling, hlm. 200.

pembangunan ekonomi di kawasan Asia Tenggara juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Yang terjadi sebenarnya adalah negara-negara ASEAN yang mendapat aliran FDI mengalami pertumbuhan ekonomi juga, pembangunan terjadi di negara-negara ASEAN, namun dengan laju pertumbuhan yang lebih rendah daripada negara-negara *center*. Negara-negara *center* pembangunannya sangat pesat. Jadi perekonomian baik yang *developed* dan *underdeveloped* sama-sama mengalami pertumbuhan pembangunan ekonomi tapi dengan laju yang berbeda. Apabila dianalogikan dalam sebuah perlombaan mobil, perekonomian negara *developed* melaju dengan kecepatan yang lebih tinggi dari pada perekonomian negara *underdeveloped*.

Negara-negara ASEAN mengalami apa yang disebut dengan *dependent development*. Penjelasan sederhananya adalah negara-negara ASEAN tergantung terhadap pembangunan negara *center* seperti EU, Asia Timur, dan Amerika. Apabila negara *center* atau merosot, perekonomian negara-negara ASEAN juga akan ikut merosot. Jadi yang dimaksud *dependent development* menurut Cardoso bukan ketergantungan di mana negara *center* semakin maju dan negara-negara *periphery* semakin terpuruk dan tereksplorasi. Jika perekonomian negara *center* meningkat maka perekonomian negara-negara *periphery* seperti ASEAN juga akan meningkat. Bedanya adalah negara-negara *center* peningkatannya lebih besar dibanding dengan negara-negara *periphery*.

Untuk lebih jelasnya akan disajikan

data masuknya FDI di ASEAN berdasarkan negara pemilik FDI sebagai ilustrasi. Akan diambil contoh kasus Jepang sebagai salah satu kekuatan ekonomi kawasan Asia Timur. Pengaruh Jepang di kawasan Asia Tenggara sangat besar. FDI dari Jepang tercatat paling besar di kawasan Asia Tenggara apabila dibandingkan dengan negara-negara lain, bahkan lebih besar daripada FDI yang berasal dari Amerika Serikat.

**Tabel 9. FDI Inflow, by source country (in US\$ million)**<sup>278</sup>

Source Country	2003	2006	2007	2008	2009	2010*	%Share 2010*
Intra-ASEAN	2,712	7,878	9,626	9,449	5,273	12,279	18.1
Australia	155	467	1,491	787	770	1,705	2.3
Canada	82	252	391	651	504	1,641	2.2
China	201	1,035	1,741	1,874	4,158	2,861	3.8
EU-27	8,866	13,387	18,611	7,010	9,132	17,088	22.4
India	104	-262	1,453	547	911	2,584	3.4
Japan	3,903	10,413	8,844	4,129	3,763	8,386	11.0
New Zealand	83	-209	89	-82	263	95	0.1
Pakistan	2	10	21	8	9	31	0.0
Republic of Korea	552	1,258	2,714	1,596	1,347	3,770	4.9
Russia	n.a	1	31	81	157	61	0.1
USA	1,363	3,041	8,340	3,518	4,567	8,878	11.3
Rest of the World	8,489	19,401	22,268	17,439	7,989	17,093	22.4
Unspecified	168	1,397	967	309	-	-	0.0
<b>Total</b>	<b>34,512</b>	<b>58,648</b>	<b>75,893</b>	<b>47,076</b>	<b>38,368</b>	<b>78,256</b>	<b>100.0</b>

Aliran FDI dari Jepang mengalami penurunan pada tahun 2008 dan 2009, namun meningkat lagi pada tahun 2010. Penurunan ini tentu saja disebabkan karena krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008. Situasi tersebut mempengaruhi berkurangnya aliran FDI yang masuk ke negara-negara ASEAN. Menurut pendekatan Cardoso mengenai *dependent development*, seharusnya negara-negara ASEAN juga mengalami penurunan seperti apa yang dialami oleh perekonomian Jepang.

Pada kenyataannya, perekonomian

<sup>278</sup> ASEAN, ASEAN Community in Figures 2011 (online), 2012, p. 38, <www.aseansec.org/.../ASEAN%20community%20in%2

ASEAN juga mengalami penurunan pada tahun-tahun krisis tersebut. Data menunjukkan bahwa Jumlah ekspor negara ASEAN-6 mengalami penurunan sangat signifikan, pada tahun 2008 besarnya US\$ 903.952,3 juta, namun pada tahun 2009 menurun menjadi US\$ 741.233,8 juta.<sup>279</sup> Neraca perdagangan ASEAN juga menunjukkan penurunan dari total US\$ 108.820,1 juta pada tahun 2007 menjadi US\$ 57.946,4 juta pada tahun 2008 dan US\$ 84.135,2 juta pada tahun 2009.

Dalam melihat hubungan struktur nasional negara-negara ASEAN dengan struktur internasional, FDI menjadi variabel yang penting dalam menentukan performa atau prestasi pembangunan negara-negara di ASEAN. Setiap negara di ASEAN menerima FDI meskipun besarnya berbeda-beda. Besarnya FDI tersebut kemudian mempengaruhi prestasi pembangunan masing-masing negara.

### Perbedaan Prestasi Pembangunan Ekonomi Negara-negara Anggota ASEAN

Dalam era industrialisasi, FDI memegang peranan penting sebagai pemberi stimulus bagi pembangunan. FDI menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi berorientasi ekspor. Namun, nyatanya FDI juga mempengaruhi munculnya ketimpangan pembangunan yang begitu besar di ASEAN. Jumlah FDI yang mengalir ke negara-negara

ASEAN besarnya berbeda-beda. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah besarnya FDI yang masuk ke masing-masing negara ASEAN berbanding lurus terhadap peningkatan performa perekonomian masing-masing negara. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, berikut adalah data FDI *inflow* yang masuk ke negara-negara ASEAN. Data ini dapat digunakan untuk menganalisa pengaruh FDI terhadap performa perekonomian negara-negara ASEAN.

**Tabel 10. Aliran FDI yang Masuk ke Negara-negara ASEAN**<sup>280</sup>

ASEAN: FDI inflow, by host country (in US\$ million) for periods indicated

Host Country	2003	2006	2007	2008	2009	2010 <sup>a</sup>	%Share 2010 <sup>a</sup>
Brunei Darussalam	3.123	434	260	239	370	629	0.8
Cambodia	84	483	867	815	830	783	1.0
Indonesia	1.698	4.914	6.928	8.318	4.877	13.304	17.5
Lao PDR	20	187	324	228	319	333	0.4
Malaysia	2.473	6.072	8.538	7.248	1.381	9.156	12.0
Myanmar	291	428	715	976	963	480	0.6
Philippines	491	2.921	2.916	1.544	1.963	1.713	2.2
Singapore	11.841	29.349	37.033	8.689	15.279	36.620	46.6
Thailand	5.235	9.460	11.330	8.639	4.976	6.320	8.3
Viet Nam	1.450	2.400	8.739	5.579	7.800	8.000	10.5
<b>Total ASEAN</b>	<b>24.812</b>	<b>58.648</b>	<b>78.850</b>	<b>47.078</b>	<b>38.268</b>	<b>78.208</b>	<b>100.0</b>
CLMV	1.845	3.498	8.645	11.597	8.421	9.950	12.6
<b>ASEAN6</b>	<b>22.967</b>	<b>53.149</b>	<b>67.006</b>	<b>35.478</b>	<b>28.845</b>	<b>66.643</b>	<b>87.4</b>

Sumber: ASEAN Community in Figures 2011

Dari tabel di atas, didapat data yang menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN-6 mendapat rata-rata aliran FDI yang lebih besar dibandingkan dengan negara-negara CLMV. Total perbandingan FDI ASEAN-6 mencapai 87,4 % sedangkan CLMV hanya sebesar 12,6%. Namun, ada satu kasus di mana apabila kita membandingkan per negara dan mengesampingkan pengelompokan CLMV dan ASEAN-6, jumlah FDI yang masuk ke

0figures.pdf>, diakses pada tanggal 19 September 2012.

<sup>279</sup> ASEAN, ASEAN Statistical Yearbook 2010 (online), 2011, p. 76, <<http://www.asean.org/resources/2012-02-10-08-47-55/statistical-publications>>, diakses 7 November 2012.

<sup>280</sup> ASEAN, ASEAN Community in Figures 2011 (online), 2012, p. 37, <[www.aseansec.org/.../ASEAN%20community%20in%20figures.pdf](http://www.aseansec.org/.../ASEAN%20community%20in%20figures.pdf)>, diakses pada tanggal 19 September 2012.

Vietnam lebih besar apabila dibandingkan dengan FDI yang masuk ke Filipina bahkan Thailand.

Selanjutnya performa ekonomi masing-masing negara ASEAN bisa dilihat dari kinerja ekspornya. Berikut adalah data-data ekspor negara-negara ASEAN dalam kurun waktu tahun 1998 sampai 2010.

**Tabel 11. Data Ekspor Masing-masing Negara ASEAN**<sup>281</sup>

ASEAN: Export and Import  
for periods indicated

Country	1998	2000	2003	2008	2009	2010
Export in US\$ million	316,601	410,141	402,267	677,537	810,473	1,070,941
Brunei Darussalam	1,924	2,169	3,211	10,268	7,152	8,615
Cambodia	-	1,368	2,116	4,359	4,966	5,584
Indonesia	48,848	62,124	61,056	137,020	116,510	157,779
Laos PDR	-	-	144	828	1,237	2,433
Malaysia	77,029	98,154	104,983	194,496	156,891	196,801
Myanmar	-	1,194	4,464	6,621	6,341	7,600
Philippines	29,496	38,078	36,231	48,025	38,335	51,432
Singapore	109,803	138,352	159,900	338,176	269,832	371,194
Thailand	49,482	68,701	80,450	174,967	152,467	195,312
Viet Nam	-	-	-	61,778	66,691	72,192

Sumber: ASEAN Community in Figures 2011

Dalam kasus di ASEAN, melihat data masuknya FDI dan kinerja ekspor masing-masing negara ASEAN. Dapat dipahami bahwa besarnya aliran FDI yang masuk berkorelasi positif terhadap performa perekonomian negara tersebut yang dapat dilihat dari kinerja ekspornya. Negara-negara ASEAN-6 mendominasi nilai ekspor ASEAN. Perbandingan yang sangat kontras terlihat dari perbandingan total ekspor Singapura dan Laos. Singapura memiliki total ekspor mencapai US\$ 371.194 juta sedangkan Laos hanya sebesar US\$ 2.433 juta pada tahun 2010. Cardoso

<sup>281</sup> ASEAN, ASEAN Community in Figures 2011 (online), 2012, hlm. 12, <[www.aseansec.org/.../ASEAN%20community%20in%20figures.pdf](http://www.aseansec.org/.../ASEAN%20community%20in%20figures.pdf)>, diakses pada tanggal 19 September 2012.

berpendapat bahwa dalam perekonomian modern, ekspor memegang peranan penting bagi pembangunan karena memungkinkan adanya akumulasi dan pendanaan industri.<sup>282</sup>

Dengan demikian suatu negara dengan performa ekspor yang tinggi mampu mengakumulasi keuntungan dari hasil ekspor untuk diubah menjadi modal dasar pembangunan di negaranya.

Kemajuan pembangunan suatu negara dipengaruhi oleh kinerja ekspornya dan kinerja ekspor tersebut dipengaruhi oleh FDI. Kondisi yang terjadi di ASEAN menunjukkan bahwa jumlah FDI yang masuk ke masing-masing negara ASEAN sangat bervariasi dan selisihnya sangat besar. Tentunya ada faktor yang menyebabkan besarnya perbedaan aliran FDI ke setiap negara ASEAN. Kenapa FDI yang masuk ke negara-negara CLMV jumlahnya jauh lebih sedikit apabila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN-6.

Ternyata hal tersebut ada kaitannya dengan perbedaan paradigma pembangunan yang diadopsi oleh negara-negara ASEAN. Negara ASEAN-6 mengadopsi paradigma *market-led development*, sedangkan negara-negara CLMV mengadopsi paradigma *state-led development*. Paradigma pembangunan yang diadopsi oleh suatu negara tentunya akan mempengaruhi kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengatur perekonomian negaranya. Di ASEAN sendiri ada dua paradigma pembangunan ekonomi dominan yang kemudian diadopsi negara-negara

<sup>282</sup> Cardoso dan Falleto, hlm. 155

ASEAN. Kedua paradigma pembangunan tersebut adalah *State-led Development* dan *Market-led Development*.

Struktur ekonomi terbentuk dan dipengaruhi oleh kejadian yang terjadi di masa sebelumnya. Struktur perekonomian modern di Asia Tenggara diawali pasca berakhirnya perang dunia kedua. Perebutan pengaruh ideologi sosialis dan liberal telah membagi negara-negara di Asia Tenggara menjadi dua bagian. Terbaginya negara ASEAN menjadi dua turut mempengaruhi paradigma pembangunan yang diadopsi oleh masing-masing negara. Negara ASEAN-6 memilih untuk mengadopsi *market-led development* karena berpihak kepada barat sedangkan negara CLMV pada awal kemerdekaan setelah perang memilih untuk mengadopsi *state-led development*. Perbedaan keputusan untuk mengadopsi paradigma pembangunan ternyata mempengaruhi performa perekonomian kedepannya.

*State-led Development* adalah model pembangunan berdasarkan sistem ekonomi sosialis. Perekonomian dikontrol oleh kepentingan pemerintah daripada permintaan pasar.<sup>283</sup> Peran pemerintah sangat besar dalam model pembangunan seperti ini. Negara dengan model pembangunan semacam ini cenderung lebih tertutup dan berusaha mengisolasi diri dari dunia luar untuk menghindari pengaruh buruk dari luar khususnya pengaruh buruk dari sistem ekonomi pasar yang menguntungkan negara maju.

Budi Winarno menjelaskan bahwa pada era 1950an dan 1960an paradigma *state-led development* menguasai sebagian besar pemikiran para pengambil kebijakan publik di sebagian besar negara di dunia. Intervensi negara sangat kuat dalam menentukan arah kebijakan dalam pembangunan ekonomi. Namun saat ini ketika neoliberal muncul dan menghegemoni dunia, neoliberalisasi telah menggeser paradigma tersebut dan menggantikannya dengan *market-led development*, yaitu pembangunan yang berorientasi pasar. Peran negara kemudian termarginalkan oleh peran dari pasar.<sup>284</sup> Hanya sedikit negara yang masih mempertahankan model pembangunan dengan paradigma *state-led development*.

Kelompok negara CLMV adalah negara-negara yang memilih *state-led development* sebagai model pembangunan di negara mereka pada awal negara ini muncul. Myanmar memilih untuk menjalankan model pembangunan seperti ini sejak kudeta yang terjadi pada tahun 1962. Myanmar memilih untuk mengisolasi diri dari dunia luar dengan pembangunan isolasionis yang unik dan diberi nama *The Burmese Road to Socialism*. Vietnam utara tidak mendapatkan dukungan dari barat selama perjuangan melawan penjajah yaitu Perancis. Akhirnya setelah mendapatkan kemerdekaan pada tahun 1954, Vietnam memilih strategi pembangunan komunis. Laos mengadopsi sosialisme ketika Pathet Lao menang atas pemerintahan kerajaan yang didukung AS pada akhir konflik

---

<sup>283</sup> McGregor, hlm. 51.

<sup>284</sup> B. Winarno, *Pertarungan Negara vs Pasar*, Medpress, Yogyakarta, 2009, hlm. 135-136.

Vietnam. Sedangkan Kamboja mulai bereksperimen dengan *state-led development* pada pemerintahan Pol Pot yang memerintah secara brutal tahun 1975 – 1978 dan pada masa pendudukan Vietnam dengan lebih konvensional yaitu tahun 1978 – 1989.<sup>285</sup>

Secara historis paradigma yang diadopsi negara-negara CLMV pada awal berdirinya negara-negara tersebut dipengaruhi oleh ideologi sosialis yang berseberangan dengan ideologi kapitalis. Struktur perekonomian modern didominasi oleh ideologi kapitalis. Teori modernisasi sangat berpengaruh dalam menimbulkan sentimen negatif terhadap komunisme sehingga para pemodal asing enggan untuk menanamkan investasi ke negara yang pernah mendapat pengaruh ideologi sosialis. Padahal investasi merupakan salah satu komponen utama untuk meningkatkan pembangunan.

Negara CLMV yang menggunakan model *state-led development* pembangunannya rata-rata tertinggal jauh dengan pembangunan di negara ASEAN-6. Meskipun negara CLMV pembangunannya tertinggal, anggapan yang menyatakan bahwa *market-led development* relatif lebih baik daripada *state-led development* tidak sepenuhnya benar. Perlu penelitian lebih jauh untuk menjelaskan fenomena ini. Tentunya ada penyebab mengapa model pembangunan dengan *state-led development* belum berhasil membawa pembangunan negara CLMV pada level yang setara dengan pembangunan yang terjadi di negara ASEAN-6.

Di Asia Tenggara, negara-negara yang baru saja merdeka pasca perang dunia kedua seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Indonesia (ASEAN-5) dan Brunei memilih untuk membangun jaringan kolonial mereka dengan berpihak pada Amerika Serikat. Meskipun selama masa penjajahan mereka didominasi oleh barat, negara-negara tersebut memutuskan untuk berpihak kepada barat mengingat proses transisi untuk mendapatkan kemerdekaan didapatkan dengan cara damai. Indonesia adalah pengecualian karena Indonesia mendapatkan kemerdekaan dengan perlawanan senjata.<sup>286</sup>

*Market-led development* adalah model pembangunan di mana perekonomian dikontrol oleh permintaan pasar. Peran pemerintah sangat kecil dalam model pembangunan semacam ini. Sebenarnya menjadikan *market-led development* sebagai model pembangunan juga menimbulkan dilema tersendiri bagi keenam negara tersebut. Teori Neo-Marxis seperti teori dependensi dan sistem dunia membantu untuk mengartikulasikan dilema yang dihadapi para pemimpin di Asia Tenggara. Dengan model *market-led development*, negara *periphery* seperti negara-negara di Asia Tenggara mengeksport bahan dasar dengan harga rendah ke negara *core* dan mengimpor barang manufaktur dengan nilai tinggi kembali ke negara mereka. Sistem ini lebih menguntungkan negara *core* dan semakin eksploitatif untuk negara *periphery*.<sup>287</sup>

---

<sup>285</sup> McGregor, hlm. 52.

---

<sup>286</sup> McGregor, hlm. 48.

<sup>287</sup> McGregor, hlm. 49.

### **Ketimpangan Pembangunan dan Pembentukan AEC**

Quayle dalam tulisannya menjelaskan bahwa tujuan utama dari AEC adalah menciptakan satu pasar dan basis produksi, kawasan ekonomi yang kompetitif, pemerataan pembangunan ekonomi dan kawasan yang terintegrasi secara global. Tujuan AEC tersebut akan sulit untuk dicapai apabila salah satu pilar AEC belum tercapai. Mempersempit jarak perbedaan merupakan faktor penting yang sangat mempengaruhi keberhasilan ASEAN dalam proses integrasinya.<sup>288</sup> Thanh juga menjelaskan akan pentingnya isu ketimpangan pembangunan ini dalam proses integrasi kawasan. Proses integrasi di kawasan ini tidak akan berhasil apabila ketimpangan pembangunan di ASEAN, khususnya antara negara CLMV dan negara ASEAN yang lebih maju terus meluas. Oleh karena itu mengurangi jarak perbedaan dalam pembangunan antara CLMV dan negara anggota ASEAN yang lain merupakan agenda mendesak untuk mensukseskan proses integrasi kawasan.<sup>289</sup>

Kedua penulis tersebut mempunyai pandangan yang sama dalam melihat pentingnya isu ketimpangan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan AEC. Tulisan ini juga berada pada posisi yang sama dengan kedua penulis tersebut dalam melihat ketimpangan pembangunan. Ketimpangan pembangunan merupakan isu penting dan dapat berpengaruh terhadap keberhasilan AEC.

Kedua penulis tersebut mempunyai pandangan yang sama dalam melihat pentingnya isu ketimpangan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan AEC. Tulisan ini juga berada pada posisi yang sama dengan kedua penulis tersebut dalam melihat ketimpangan pembangunan. Ketimpangan pembangunan merupakan isu penting dan dapat berpengaruh terhadap keberhasilan AEC. Namun, kedua penulis di atas belum menjelaskan dalam hal apa ketimpangan pembangunan dapat menghambat integrasi kawasan dan mengapa isu ketimpangan pembangunan ini penting untuk diatasi.

Ketimpangan di dalam pembangunan sebenarnya bukan menjadi masalah apabila hubungan antar negaranya fungsional. Meskipun kondisi ekonominya timpang, apabila mereka saling mengisi dalam kegiatan perekonomian, tetap bisa berdagang dan bekerja sama tentunya ketimpangan tidak menjadi suatu masalah. Contohnya adalah apa yang terjadi di Uni Eropa, ketimpangan pembangunan ekonomi juga terjadi di sana. Ada beberapa negara yang pendapatan perkapitanya jauh lebih rendah dari negara-negara Uni Eropa yang lain. Negara-negara tersebut antara lain: Bulgaria, Republik Ceko, Estonia, Yunani, Kroasia, Latvia, Lithuania, Hungaria, Malta, Polandia, Portugal, Romania, Slovenia, dan Slovakia. Di sisi lain ada negara-negara yang GDP perkapitanya sangat tinggi seperti Luxembourg, Belanda, Swedia,

<sup>288</sup> L. Quayle, 'Asean Updates on Regional Development Issues', paper dipresentasikan di Universitas Gadjah Mada pada tanggal 2 Maret 2012, hlm. 3.

<sup>289</sup> V.T. Thanh, 'Narrowing the development gap in ASEAN: Approaches and Policy Recommendations',

dalam H. Soesastro, *Deepening Economic Integration in Southeast Asia: The ASEAN Economic Community and Beyond*, ERIA Research Project Report 2007, No. 1-2, Chiba: IDE-JETRO, 2008, hlm. 147-148.

Irlandia, Belgia, Inggris dan Swiss.

Meskipun pembangunan ekonominya timpang, namun hubungan antar negara bersifat fungsional. Hal ini ditunjukkan dari volume *intra-trade* dan *extra-trade* Uni Eropa yang selisihnya tidak terlampau besar di Eropa. *Extra-trade* Uni Eropa besar tetapi *intra-trade* nya juga besar. Misalnya saja untuk volume perdagangan *extra-Uni Eropa trade* tahun 2010 besarnya mencapai € 2.858.238 juta sedangkan *intra-trade* nya sebesar € 2.534.008 juta.<sup>290</sup> Karena hubungan antar negara Uni Eropa fungsional, ditandai dengan keseimbangan antara volume *intra-trade* dan *extra-trade* nya, ketimpangan pembangunan tidak menjadi masalah dalam hubungan antar negara di Uni Eropa.

Di ASEAN, kondisinya berbeda, hubungan antar negara tidak fungsional. Untuk melihat hubungan ekonomi negara-negara ASEAN fungsional atau tidak dapat dilihat dari perbandingan antara *intra-trade* dan *extra-trade* ASEAN. Data yang diperoleh dari *ASEAN Community in Figures* tahun 2011 menunjukkan kecenderungan bahwa nilai *extra-trade* ASEAN jauh lebih besar dari pada *intra-trade* nya. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN lebih memilih untuk melakukan perdagangan dengan negara di luar ASEAN.

Dari tahun 1998 sampai 2010 *extra-trade* ASEAN lebih besar daripada *intra-trade* ASEAN itu sendiri. Pada tahun 1998 *intra-*

*trade* ASEAN sebesar US\$ 120.918 juta atau sekitar 21% total perdagangan ASEAN. Sedangkan pada tahun 2010 meskipun volume perdagangan *intra-trade* ASEAN meningkat, yaitu sebesar US\$ 519.805 juta, namun nilai ini juga masih lebih kecil dari *extra-trade* ASEAN itu sendiri. Jumlah tersebut hanya 25% dari total perdagangan ASEAN. Jumlah *extra-trade* tersebut didominasi oleh beberapa negara saja. Mitra dagang yang paling dominan adalah China, Jepang, Korea Selatan, Uni Eropa dan Amerika Serikat. Rata-rata kelima negara tersebut memiliki total perdagangan dengan ASEAN sebesar 45% - 55% dari total keseluruhan volume perdagangan ASEAN.<sup>291</sup>

Kunci utama dalam pembentukan suatu komunitas adalah harmonisasi. Negara-negara ASEAN berusaha melaksanakan beberapa agenda harmonisasi kebijakan. Hal ini diperlukan untuk mencegah terjadinya perselisihan antar negara anggota dan mempermudah dilakukannya suatu kerjasama. Harmonisasi secara pasti sulit untuk didefinisikan karena istilah ini bisa digunakan dalam bidang atau bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan penggunaannya. Konsep mengenai harmonisasi sendiri sering digunakan dalam ilmu hukum. Ada konsep lain yang hampir mirip dengan harmonisasi yaitu unifikasi. Kedua konsep ini memang hampir mirip satu sama lain namun ada perbedaan yang harus diperhatikan. Kedua konsep tersebut, baik harmonisasi maupun unifikasi

<sup>290</sup>

European Commission, External and intra-EU trade a statistical yearbook Data 1958-2010, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2011, hlm. 56, 57, 79.

<sup>291</sup> ASEAN, ASEAN Community in Figures 2011 online <[www.aseansec.org/.../ASEAN%20community%20in%20figures.pdf](http://www.aseansec.org/.../ASEAN%20community%20in%20figures.pdf)>, diakses pada tanggal 19 September 2012. hlm. 13

sama-sama mengandung arti sebagai upaya atau proses yang bertujuan untuk menyeragamkan substansi pengaturan sistem-sistem hukum yang berlaku. Penyeragaman yang dilakukan meliputi pengintegrasian sistem hukum yang sebelumnya berbeda.<sup>292</sup>

Perbedaan terletak pada derajat penyeragaman yang dilakukan. Dalam unifikasi hukum, proses penyeragaman bisa mencakup penghapusan atau penggantian sistem hukum yang lama dengan yang baru. Dalam harmonisasi penyeragaman tidak dilakukan sedalam unifikasi. Tujuan utama dari harmonisasi adalah mencari titik temu antara prinsip-prinsip fundamental yang akan diseragamkan.<sup>293</sup> Jannis dan Yusof menjelaskan harmonisasi sebagai berikut:

*"Harmonization refers to the process whereby the ASEAN Member Countries seek to promote the integration of their economies and the move towards a single market by adopting similar policies, legislation, regulations and implementation arrangements. Collectively, harmonization of these issues provides the necessary framework for increased trade in goods and services among the members and also makes the ASEAN region more attractive for direct investment - both foreign and intra-ASEAN."*<sup>294</sup>

Dalam tulisan ini, konsep harmonisasi yang akan digunakan adalah harmonisasi

dalam kebijakan yang akan dibuat untuk mendukung proses integrasi ekonomi negara-negara ASEAN dalam AEC. ASEAN terdiri dari 10 negara dengan tingkat perekonomian yang beragam, perlu adanya harmonisasi kebijakan untuk menyatukan pandangan dan meminimalisir terjadinya gesekan atau benturan kebijakan dalam membentuk suatu komunitas ekonomi ASEAN. Dari berbagai pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa harmonisasi kebijakan yang dimaksud adalah usaha untuk mengurangi perbedaan diantara negara-negara yang ingin berintegrasi, dengan demikian kebijakan dan kerangka kerjasama negara-negara tersebut menjadi seragam.

Contoh kasus mengenai hambatan mewujudkan harmonisasi kebijakan dapat dilihat dari usaha ASEAN untuk melakukan harmonisasi tarif melalui program CEPT. Beberapa negara tidak kooperatif dalam menjalankan skema harmonisasi tarif melalui CEPT. Tentunya hal tersebut akan menghambat upaya mewujudkan harmonisasi kebijakan. Ketimpangan pembangunan menjadi salah satu faktor penyebabnya. Ketimpangan pembangunan kemudian menyebabkan munculnya *tariff dispute* antar negara anggota ASEAN. Dengan prestasi pembangunan yang berbeda-beda, masing-masing negara berusaha untuk menjaga sektor strategis mereka agar terhindar dari dampak negatif akibat penurunan tarif yang memungkinkan produk negara ASEAN lain yang berdaya saing tinggi masuk dengan leluasa dan dapat menghancurkan pasar domestik.

<sup>292</sup> H. Adolf, 'Hukum Perdagangan Internasional: Prinsip-Prinsip dan Konsepsi Dasar', 2004, hlm. 32, <<http://pasca.uma.ac.id/adminpasca/upload/Elib/MHB/1%20HUKUM%20PERDAGANGAN%20INTERNASIONAL%20Prinsip-prinsip%20dan%20Konsepsi%20Dasar.PDF>>, diakses pada 1 Maret 2012.

<sup>293</sup> Adolf, hlm. 33

<sup>294</sup> D. D. Jannis dan Z. A. Yusof, 'Developing Indicators of ASEAN Integration - A Preliminary Survey for A Roadmap', 2003, <[www.ausaid.gov.au/publications/pdf/developing\\_indicators.pdf](http://www.ausaid.gov.au/publications/pdf/developing_indicators.pdf)>, diakses pada 13 Maret 2012.

Dalam menegosiasikan masalah penurunan tarif, keenam negara pada pertemuan tahun 1993 setuju untuk melakukan liberalisasi melalui skema CEPT, pengurangan dan penghapusan tarif produk sebesar 0-5%. Diikuti oleh Vietnam kemudian Laos, Myanmar dan Kamboja. Namun kesepakatan tersebut tidak bersifat mengikat mengingat prinsip dasar dalam ASEAN adalah *non-interference*. Setiap negara tidak berhak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Karena kesepakatan tersebut tidak bersifat mengikat, setiap negara ASEAN dapat menarik kembali kesepakatan yang sudah mereka setuju di awal perundingan. Negara-negara ASEAN berambisi dan berkomitmen untuk melakukan liberalisasi, namun kadang-kadang mereka juga menarik ulang kesepakatan yang sudah diambil. Soesastro dalam tulisannya berpendapat bahwa kerjasama regional dan pembentukan komunitas regional di ASEAN sering berakhir terbuka. Hal ini terjadi karena agenda-agenda tersebut tidak bersifat mengikat karena memang pada dasarnya ASEAN merupakan organisasi yang bersifat suka rela.<sup>295</sup> Jika dibandingkan dengan Uni Eropa, perbedaan yang mendasar adalah proses integrasi Uni Eropa didorong oleh kekuatan institusi regional yang kuat sedangkan ASEAN masih berusaha untuk membangunnya.<sup>296</sup>

Proses negosiasi terkait proses menuju integrasi kawasan melalui liberalisasi didominasi oleh 5 kekuatan besar yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Keempat negara, selain Singapura, bersikeras mengeksklusikan beberapa produk yang dianggap penting untuk dimasukkan kedalam *Inclusion Lists* CEPT. Singapura sebagai pelopor utama FTA melihat AFTA mengalami kemunduran karena beberapa negara menarik kembali kesepakatan dan mengeksklusikan beberapa produk yang dianggap penting. Beberapa produk yang sering dipermasalahkan adalah produk petrokimia, otomotif, dan *unprocessed agriculture*. Dibandingkan negara-negara ASEAN lain. Keempat negara tersebut mempunyai *leverage* yang besar.

Singapura merupakan inisiator FTA di ASEAN, Singapura adalah negara yang paling siap untuk FTA. Singapura merupakan negara dengan pembangunan pesat dan berorientasi ekspor. Letak geografis strategis dan infrastruktur yang memadai, membuat Singapura menjadi *enter port* utama bagi dunia internasional untuk masuk ke dalam kawasan perdagangan Asia Tenggara. Selain itu Singapura juga membangun FTA secara bilateral dengan negara-negara di luar ASEAN seperti, Jepang, EU dan Selandia Baru. Dengan cara tersebut, Singapura yang merupakan negara kecil secara geografis dan populasi ini mempunyai *leverage* karena mempunyai potensi kerja sama FTA bilateral dengan negara di luar ASEAN. Bilateral FTA tersebut dapat berdampak positif dan destruktif bagi perekonomian kawasan. Singapura dapat menjadi jembatan negara-negara ASEAN

---

<sup>295</sup> Soesastro, *Deepening Economic Integration in Southeast Asia: The ASEAN Economic Community and Beyond*, hlm. 48.

<sup>296</sup> H. Soesastro, 'Implementing the ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint', dalam H. Soesastro, *Deepening Economic Integration in Southeast Asia: The ASEAN Economic Community and Beyond*, ERIA Research Project Report 2007, No. 1-2, Chiba: IDE-JETRO, 2008, hlm. 49.

kedalam perdagangan internasional, tetapi di sisi lain Singapura juga berpotensi menjadi *back door* negara-negara di luar ASEAN untuk masuk dalam AFTA.

Indonesia, negara terbesar di ASEAN dilihat dari segi geografis, populasi dan total GDP, merupakan negara yang memiliki *leverage* kuat karena Indonesia memiliki pasar yang sangat besar dan tidak dimiliki negara-negara ASEAN lain seperti Singapura dan Brunei. Indonesia menjadi tujuan ekspor negara-negara ASEAN yang lain. Jika Singapura memiliki kedekatan dengan mitra potensial bilateral FTAnya, maka Indonesia memiliki pasar yang potensial. Indonesia dalam AFTA berusaha untuk mengeksklusikan produk-produk *unprocessed agriculture* dan petrokimia.

Malaysia dan Thailand merupakan dua negara yang kuat industri manufaktur dan otomotifnya. Thailand memiliki basis industri otomotif yang kuat karena Thailand merupakan basis industri otomotif Jepang di kawasan Asia Tenggara. Thailand mendapat dukungan investasi berupa FDI dari perusahaan multi nasional Jepang seperti Toyota. Sedangkan Malaysia merupakan negara ASEAN yang mampu lepas dari dampak negatif krisis 1997-1998. Pemulihan ekonomi pasca krisis tergolong cepat. Sama dengan Thailand, Malaysia memiliki industri otomotif yang kuat, bedanya adalah Malaysia lebih memilih untuk mengembangkan industri otomotif nasional. Malaysia merasa tidak aman dengan keberadaan industri otomotif Thailand dan pada tahun 2002 memutuskan untuk mengeksklusikan produk otomotif dari

*Inclusion Lists* CEPT untuk melindungi pasar otomotif domestik.<sup>297</sup>

Keputusan Malaysia ternyata memicu negara lain untuk melakukan hal serupa. Filipina kemudian melakukan hal yang serupa untuk produk petrokimia. Di Filipina, Federasi Industri memaksa pemerintah untuk menunda pemberlakuan CEPT sampai pada tahun 2003, namun permintaan tersebut tidak ditanggapi oleh pemerintah meskipun di tahun 2002 pemerintah Filipina sempat mengisyaratkan niatnya untuk sementara mengeksklusikan petrokimia dari daftar CEPT. Sikap ini terpengaruh oleh keputusan Malaysia yang sudah mengeksklusikan industri otomotif dari daftar CEPT.<sup>298</sup>

Negara-negara CLMV dengan kemampuan ekonomi yang masih mengandalkan sektor agraris, memiliki kepentingan untuk mengeksklusikan produk *unprocessed agriculture* dari *Inclusion Lists* untuk melindungi pertanian domestik mereka. Beras merupakan produk yang sangat susah untuk dimasukkan dalam *Inclusion List* masing-masing negara karena menyangkut ketahanan pangan suatu negara. Indonesia pun demikian, meskipun pernah mencapai swasembada pangan tetapi desakan beras impor dan produk pertanian-hortikultura memaksa Indonesia untuk menunda pengurangan dan penghapusan tarif.

Dengan adanya skema CEPT ini sebenarnya sangat merugikan negara-negara

---

<sup>297</sup> H. E. S. Nesadurai, *Globalization, Domestic and Regionalism The ASEAN Free Trade Area*, Routledge, London, 2003, hlm. 115.

<sup>298</sup> Nesadurai, hlm. 115.

CLMV karena meskipun diberikan waktu lebih untuk mempersiapkan perekonomiannya, tetap saja negara-negara tersebut belum siap. Dengan skema CEPT yang harus dijalankan malahan mereka kehilangan pemasukan dari pajak yang selama ini mereka dapatkan dari bea impor.

Perbedaan prestasi pembangunan ternyata berimbas kepada ditariknya kembali kesepakatan pengurangan tarif yang sudah disetujui bersama oleh negara-negara ASEAN. Tidak ada sanksi atas tindakan tersebut, mengingat prinsip utama ASEAN adalah *non-interference* dalam hubungan antar negara ASEAN. Masing-masing negara merasa tidak aman dalam keterlibatan mereka di AFTA sehingga memicu mereka untuk melakukan eksklusi beberapa produk dari *Inclusion Lists*. Komitmen negara-negara ASEAN kembali dipertanyakan karena ini merupakan suatu kemunduran dalam usaha liberalisasi yang sudah dilaksanakan selama ini.

Apabila kondisi ini tetap berlangsung, maka harmonisasi tarif akan sulit untuk diwujudkan. Bahkan ketika semua sudah diharmonisasikan, ada kemungkinan suatu negara untuk menarik kembali kesepakatan tersebut untuk melindungi produk-produk tertentu yang penting. Kembali lagi pada prinsip dasar ASEAN yaitu *non-interference*. Semua negara dapat melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Malaysia yang mengeksklusikan produk otomotif dari *Inclusion Lists* CEPT. Belum ada skema yang jelas untuk mengatasi *tariff dispute* antar negara ASEAN.

## Kesimpulan

Ketimpangan pembangunan di ASEAN antara negara-negara ASEAN-6 dan CLMV memang sangat lebar. Data-data yang didapatkan mengenai GDP perkapita, pertumbuhan ekonomi, GNI perkapita, HDI, tingkat kemiskinan, dan infrastruktur jalan menunjukkan bahwa CLMV terlihat inferior dibanding dengan negara ASEAN-6. Perbandingannya begitu mencolok, misalnya saja jika kita melihat perbandingan salah satu indikator yaitu GDP perkapita negara ASEAN-6 dengan CLMV, rata-rata GDP perkapita ASEAN-6 16 kali lebih besar daripada rata-rata GDP perkapita CLMV. Data-data yang ditunjukkan dari indikator-indikator yang lain juga menunjukkan hal yang senada bahwa pembangunan di negara CLMV memang jauh tertinggal.

Ketimpangan ekonomi di ASEAN disebabkan oleh permasalahan struktural. Struktur nasional negara-negara ASEAN terhubung dengan struktur internasional negara-negara *center* melalui FDI dan menyebabkan *dependent development* negara-negara ASEAN terhadap negara *center*. Jika perekonomian negara-negara *center* meningkat, perekonomian negara-negara ASEAN juga meningkat. Apabila terjadi sebaliknya, maka perekonomian negara-negara ASEAN juga ikut menurun. Perbedaan strategi pembangunan yang diadopsi oleh negara-negara ASEAN mempengaruhi aliran FDI yang masuk. Negara-negara dengan strategi pembangunan *Export-Oriented Industry* (EOI) mampu meningkatkan prestasi pembangunan ekonominya melebihi negara yang masih

menggunakan strategi pembangunan *Import-Substitution Industry* (ISI). Singapura kemudian diikuti oleh Malaysia, Indonesia, Thailand dan Filipina mulai mengadopsi strategi EOI lebih awal, strategi ini didukung oleh FDI yang masuk yang kemudian meningkatkan kinerja ekspor mereka. Selama ini FDI dari negara *center* lebih banyak mengalir ke negara-negara ASEAN-6 karena menggunakan strategi EOI.

Ketimpangan pembangunan menjadi masalah karena ternyata hubungan ekonomi antar negara-negara ASEAN tidak fungsional. Hal ini bisa dilihat dari jumlah *extra-ASEAN trade* yang lebih besar daripada *intra-ASEAN trade*. Ketimpangan dalam pembangunan mempersulit usaha negara-negara ASEAN untuk menciptakan harmonisasi kebijakan, salah satunya adalah mewujudkan harmonisasi tarif. Kapasitas pembangunan negara-negara ASEAN yang masih terbatas khususnya negara-negara CLMV mempengaruhi fleksibilitas masing-masing negara untuk melakukan harmonisasi kebijakan. Padahal harmonisasi kebijakan merupakan salah satu syarat utama bagi negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu komunitas. Tanpa harmonisasi kebijakan diantara negara anggota ASEAN, maka akan sangat sulit untuk menciptakan komunitas ekonomi ASEAN.

## Referensi

### Buku

Cardoso, F.H. & Falleto, E., *Dependency and Development in America Latin*, University of California Press, California, 1979.

European Commission, *External and intra-EU trade a statistical yearbook Data 1958-2010*, Publications Office of the European Union, Luxemburg, 2011.

McGregor, A., *Southeast Asian Development*, Routledge, Oxon, 2008.

Narjoko, D., Kartika, P., & Wicaksono, T., 'Narrowing the Development Gap in ASEAN', dalam M.G. Plummer & C.S. Yue, *Realizing the ASEAN Economic Community: A Comprehensive Assesment*, Institute of Southeast Asian Studies, East-West Centre, 2009

Nesadurai, H. E. S., *Globalization, Domestic and Regionalism The ASEAN Free Trade Area*, Routledge, London, 2003.

Soesastro, H., *Deepening Economic Integration in Southeast Asia: The ASEAN Economic Community and Beyond*, ERIA Research Project Report 2007, No. 1-2, Chiba: IDE-JETRO, 2008.

Tarling, N., *Regionalism in Southeast Asia To Foster the Political Will*, Routledge, New York, 2006.

Thanh, V.T., 'Narrowing the development gap in ASEAN: Approaches and Policy Recommendations', dalam H. Soesastro, *Deepening Economic Integration in Southeast Asia: The ASEAN Economic Community and Beyond*, ERIA Research Project Report 2007, No. 1-2, Chiba: IDE-JETRO, 2008.

Weatherbee, D. E., *International Relations in Southeast Asia The Struggle for Autonomy*, 2<sup>nd</sup> edn, Rowman & Littlefield Publisher, Inc., Maryland, 2009.

Winarno, B., *Pertarungan Negara vs Pasar*, Medpress, Yogyakarta, 2009.

### Artikel Jurnal

Alavi, R. & Ramadan, A. A., 'Narrowing Development Gaps In ASEAN',

